



PERSPEKTIF

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>

Analisis Penyebab Stagnansi ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC) *Analysis on the Factors Leading to the Stagnation of ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC)*

Avelita Fitrianni Rayasti* & Muhammad Fajar Anandi

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Falsafah dan Peradaban,
Universitas Paramadina, Indonesia

Received: 11 January 2024; Reviewed: 30 January 2024; Accepted: 31 March 2024

Abstrak

Kemandirian Pertahanan menjadi hal yang tidak hanya sekedar dicita-citakan oleh berbagai negara, melainkan juga menjadi kebutuhan setiap negara. Ketika suatu negara mencapai status Kemandirian Pertahanan, maka negara tersebut tidak lagi bergantung pada negara produsen. Oleh karena itu banyak negara di dunia mencoba melakukan pengembangan teknologi persenjataan melalui industri pertahanan nasionalnya. Tidak terkecuali negara-negara anggota ASEAN, yang kemudian membidani terlahirnya kerjasama internasional industri pertahanan yang dikenal dengan ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC). ADIC dibentuk dengan tujuan untuk mampu memproduksi berbagai teknologi persenjataan, mencontoh keberhasilan kerjasama konsorsium Eropa. Walaupun demikian, hingga tahun ke 11 pendirian, ADIC masih belum berhasil menghasilkan satupun teknologi persenjataan ataupun menilai pengembangannya. Analisis dalam artikel ini dilakukan dengan mensintesis pandangan empat perspektif terkait prasyarat keberhasilan kerjasama industri pertahanan, yakni konstruktivis, institusionalis, liberalis dan realis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Causal Process Tracing (CPT) yang memang bertujuan untuk mengetahui prasyarat apa saja yang menyebabkan peristiwa tertentu. Artikel ini berkesimpulan bahwasanya kegagalan ADIC disebabkan oleh lima hal. Pertama, sistem ekonomi yang dijalankan anggota ADIC berbeda. Kedua, kapasitas industri pertahanan negara ADIC setara, yang menyebabkan timbulnya kompetisi dan menyulitkan kerjasama. Ketiga, rendahnya efek *spill-over* dari keberhasilan kerja sama sektor lain. Keempat, masih tingginya *distrust* di antara sesama negara anggota ADIC. Kelima, ketiadaan aliansi pertahanan yang menyebabkan kuatnya pertimbangan *relative gains*.

Kata Kunci: ASEAN Defense Industrial Collaboration; ASEAN; Kerjasama Pertahanan; Industri Pertahanan

Abstract

An independent defense capability is an aspiration and a crucial need for nations. Achieving this will ensure the state's independence from the possible influence of weapon-producing states. To attain this goal, countries worldwide, including those in the ASEAN region, have endeavored to advance their weapon technologies through national defense industries. The ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC), established in 2011, was conceived to emulate the success of European consortiums in producing diverse weapon technologies. Regrettably, after 11 years, ADIC has not produced or initiated the development of any weapon technology. The analysis in this article is conducted by synthesizing the perspectives of four key prerequisites for the success of defense industry cooperation: constructivist, institutionalist, liberal, and realist. The research method employed in this article is Causal Process Tracing (CPT), specifically aimed at identifying the prerequisites that lead to specific events. This article concludes that the failure of ADIC is attributed to five factors. Firstly, diverse economic systems among ADIC members create challenges. Secondly, equivalent defense industry capacities lead to competition and hinder collaboration. Thirdly, low *spill-over* effects from successful cooperation in other sectors impede progress. Fourthly, persistent distrust among ADIC member countries poses a barrier. Lastly, the absence of a defense alliance results in a strong consideration of relative gains. In essence, these factors underscore the complexity and challenges in achieving effective international defense collaboration.

Keywords: ASEAN Defense Industrial Collaboration; ASEAN; Defense Cooperation; Defense Industry

How to Cite: Rayasti, A.F., & Anandi, M.F., (2024), Analisis Penyebab Stagnansi ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC). *PERSPEKTIF*, 13 (2): 444-458

*Corresponding author:

E-mail: avelita.rayasti@students.paramadina.ac.id

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2684-9305 (Online)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan oleh pemikir-pemikir neorealisme seperti John J. Mearsheimer dan Kenneth Waltz, sistem internasional yang anarki menghadirkan dampak tersendiri pada pola interaksi dan perilaku negara. Negara selalu berlomba-lomba dengan negara lainnya untuk meningkatkan kapabilitas *power* (*struggle for power*) serta bertindak agresif. Perilaku negara terutama negara-negara *great powers* selalu dibalut dalam nuansa ketakutan, *self-help* serta *power-maximizing*, negara *great powers* akan mencoba untuk mencapai status negara hegemon, karena status *great powers* tidak cukup menjamin kelangsungan hidupnya (Mearsheimer, 2001). Negara-negara dalam politik internasional memandang satu sama lain sebagai ancaman. Mereka akan selalu dihinggapi rasa takut dan khawatir ketika Negara rivalnya melakukan usaha peningkatan kepemilikan mereka atas *power* karena bukan tidak mungkin *power* yang ada kemudian digunakan untuk menyerang. Berangkat dari rasa takut dan khawatir tersebut maka negara-negara lainnya akan ikut meningkatkan kepemilikan mereka atas *power* sebagai upaya menjamin tetap bertahan hidup (Mearsheimer, 2001; Waltz, 1979). Oleh karena itu negara-negara akan selalu berupaya mengakuisisi teknologi persenjataan guna meningkatkan kapabilitas militer mereka. Dalam melakukan akuisisi teknologi persenjataan, negara dapat memilih untuk membeli dari negara lain atau melakukan pengembangan melalui industri pertahanan nasionalnya (Bağcı & Kurç, 2017).

Bagi sebagian ahli, pengembangan teknologi persenjataan oleh industri pertahanan nasional menjadi pilihan yang lebih baik dari sisi pertahanan (R. A. Bitzinger, 2017; Kinsella, 1998; Neuman, 1988; Triantama, 2020), ekonomi (Balakrishnan & Matthews, 2009; Benoit, 1978; R. A. Bitzinger, 2003; Herrera & Matthews, 2014) serta prestise (Aini & Triantama, 2021; Bağcı & Kurç, 2017; R. A. Bitzinger, 2011, 2015; R. A. Bitzinger & Kim, 2005; Triantama, 2020) dibanding bergantung pada teknologi persenjataan produksi negara lain. Hal ini dikarenakan negara yang terlalu bergantung kepada sistem persenjataan yang diproduksi negara lain memiliki potensi terjebak di dalam pengaruh negara produsen senjata (R. A. Bitzinger, 2017; Krause, 1991; Neuman, 2010; Triantama, 2020).

Argumentasi tersebut tentunya bukan tanpa alasan. Merujuk pada catatan sejarah, negara-negara produsen senjata memanfaatkan pengaruh yang didapat melalui penjualan senjata untuk merubah perilaku dan kebijakan negara pembeli guna mencapai keuntungan dan kepentingan nasionalnya (R. A. Bitzinger, 2015; Kinsella, 1998; Neuman, 2010; Paul, 1992; Triantama, 2020). Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti ancaman embargo, hingga larangan penggunaan senjata yang telah dibeli oleh suatu negara (R. A. Bitzinger, 2015, 2017; Neuman, 2010; Rosh, 1990; Triantama, 2020). Negara produsen senjata juga memanfaatkan status mereka guna menekan negara lain dalam isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia (R. A. Bitzinger, 2013; Neuman, 2010). Sebagai contohnya adalah embargo Amerika Serikat dan Inggris terhadap Indonesia pada dekade 1990 hingga 2004 (SIPRI, 2012; Triantama, 2020).

Memahami pentingnya pembangunan kapasitas industri pertahanan nasional, negara-negara Asia Tenggara menginisiasi kerjasama industri pertahanan. Kerjasama industri pertahanan antar negara-negara Asia Tenggara ini kemudian dikenal dengan ASEAN Defense Industrial Collaboration (ADIC). ADIC sendiri dilahirkan pada Mei 2011, setelah *concept paper* yang dibawa oleh delegasi Malaysia mendapatkan persetujuan dalam forum pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN (ADMM) 2011. Namun meski baru resmi dilahirkan pada Mei 2011, pembahasan mengenai ADIC sudah dimulai pada ADMM ke-4 yang diadakan pada tahun 2010 di Vietnam (Wahyudi, 2020).

Walaupun demikian, meski disepakati dalam forum resmi ASEAN, pada kenyataannya ADIC tidak diikuti oleh seluruh negara anggota ASEAN. Hanya 4 dari 10 negara ASEAN yang terlibat dalam ADIC. Keempat negara tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand (Wahyudi, 2020). Sedangkan enam negara ASEAN yang lain tidak terlibat dalam ADIC karena tidak memiliki industri pertahanan yang representatif untuk bekerjasama. Dalam prosesnya ADIC diharapkan mampu mengurangi ketergantungan negara-negara anggotanya terhadap impor teknologi persenjataan dari negara lain. Merujuk pada data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), sejak tahun 2000 empat

negara anggota ADIC menempati 50 besar negara pengimpor senjata terbesar dunia (SIPRI, 2022). Target yang dipasang juga sangat ambisius yakni mengurangi nilai impor teknologi persenjataan dari sebesar 25 Milyar Dollar AS menjadi 12,5 Milyar Dollar AS atau sebesar 50% (Dilahwangsa dkk., 2019; Raghavan & Ben-Ari, 2011; Wahyudi, 2020).

Demi mencapai target ambisius tersebut, ADIC disiapkan untuk melakukan beberapa model kegiatan kerjasama. Model kegiatan kerjasama tersebut meliputi kerjasama pendidikan dan pelatihan industri pertahanan, *joint ventures* dan *co-production*, *co-development* serta promosi bersama. Namun sayangnya hingga saat ini ADIC tidak lebih dari sekedar “macan kertas” yang terlihat sangat progresif di atas kertas, tetapi dalam implementasinya tidak berjalan. Hingga 12 tahun setelah ADIC pertama kali disepakati pada tahun 2011, tidak ada satupun kemajuan berarti dari kerjasama industri pertahanan ini. Tidak ada satupun *platform* teknologi persenjataan yang berhasil dikembangkan. Bahkan untuk sekedar melakukan penentuan *platform* teknologi persenjataan yang akan dikembangkan juga tidak terjadi. Selain itu, impor teknologi persenjataan yang dilakukan oleh negara-negara anggota ADIC juga tetap tinggi. Merujuk data SIPRI, secara kumulatif nilai impor teknologi persenjataan negara-negara ADIC sejak tahun 2010 – 2021 termasuk dalam 50 besar dunia. Singapura menempati peringkat 14 dunia, disusul oleh Indonesia (17), Thailand (29) dan Malaysia (45). Kondisi ini serupa dengan peringkat seluruh negara tersebut pada periode 2000 – 2009, dimana keempat negara tersebut juga masuk dalam 50 besar dunia (SIPRI, 2022).

Stagnasi ADIC ini membawa dampak negatif terhadap keamanan di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ADIC masih harus memiliki ketergantungan yang tinggi kepada negara produsen senjata sehingga rawan menjadi target diplomasi koersif. Sebagai contohnya adalah Indonesia yang menjadi korban dari diplomasi koersif Amerika Serikat melalui *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act* (CAATSA) sehingga terpaksa membatalkan pengadaan jet tempur Sukhoi-35 dari Rusia (CNN Indonesia, 2020).

Isu seputar ADIC ini pada dasarnya sangat menarik untuk dikaji dari beberapa sisi. Pertama, Kerjasama industri pertahanan

ASEAN ini sejalan dengan tren pada pasar senjata dunia yang semakin banyak melakukan kolaborasi internasional (Calcara, 2020; Kinne, 2016; Kurc & Oktay, 2018). Kedua, sebagaimana disebutkan sebelumnya visi besar ADIC sangat baik dan berpotensi membawa keuntungan strategis bagi negara-negara anggota. Keuntungan strategis yang bisa diperoleh adalah kemandirian pertahanan dan politik negara. Ketiga, setelah resmi disepakati 12 tahun lalu, ADIC gagal memenuhi ekspektasi, bahkan tidak ada perkembangan signifikan yang bisa didengar sejak beberapa tahun terakhir. Namun meski sangat menarik, penelitian yang membahas ADIC masih sangat terbatas. Jikapun ada, penelitian-penelitian terdahulu terbatas pada argumentasi tentang berapa pentingnya ADIC bagi Indonesia dan negara anggota lain untuk mewujudkan kemandirian pertahanan dan mendatangkan keuntungan ekonomi (Balakrishnan & Bitzinger, 2012; Soraya dkk., 2023). Pendapat lain memandang ADIC juga dapat menjadi instrumen diplomasi pertahanan yang bagi ASEAN (Agung Wicaksono, 2022; Dilahwangsa dkk., 2019).

Selain memaparkan nilai strategis yang akan dihasilkan oleh ADIC jika berhasil terlaksana, penelitian terdahulu juga ada yang menyoroti kegagalan ADIC memenuhi ekspektasinya sendiri. Kegagalan ADIC dipercaya bersumber dari diri masing-masing negara anggotanya. Setidaknya terdapat dua hal yang disorot. Pertama, terdapat perbedaan prioritas kebutuhan teknologi, doktrin militer hingga karakter organisasi militer. Hal ini menyebabkan ADIC sangat sulit menentukan *platform* persenjataan yang akan dikembangkan (Ningsih, 2019; Raghavan & Ben-Ari, 2011). Kedua, adanya kecenderungan negara-negara ADIC melakukan akuisisi teknologi persenjataan dari negara lain, dibanding memaksimalkan kerangka ADIC (Wahyudi, 2020). Akuisisi teknologi persenjataan di luar kerangka ADIC ini tentunya akan terus melanggengkan ketergantungan negara ADIC terhadap negara lain yang tidak menguntungkan secara politik, ekonomi dan pertahanan.

Meskipun penelitian tentang ADIC masih terbatas, literatur yang ada tetap dapat memberikan pijakan pengetahuan yang berharga bagi penelitian ini. Berangkat dari literatur terdahulu, dapat disimpulkan bahwa

kegagalan ADIC untuk mencapai targetnya sangat terkait dengan kebijakan pertahanan negara-negara anggota. Namun literatur terdahulu belum memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan menggabungkan perspektif pertahanan, ekonomi maupun politik. Penelitian ini akan menganalisis apa yang menjadi penyebab ADIC tidak lebih dari sekedar “macan kertas” dengan menggabungkan perspektif pertahanan, ekonomi hingga politik.

Kegagalan ADIC untuk mencapai targetnya ini memperpanjang daftar kegagalan kerjasama internasional industri pertahanan. Sebelum ADIC, kerjasama antara Jerman dan Swedia dalam pengembangan Kapal Selam ataupun Swiss dengan Jerman dan Austria juga mengalami kegagalan (Devore & Stai, 2019). Berbagai ahli kemudian berupaya menghadirkan penjelasan penyebab dari tidak mulus atau bahkan gagalnya kerjasama internasional industri pertahanan yang sejak era Perang Dingin semakin jamak dilakukan berbagai negara (Devore & Stai, 2019). Para ahli Hubungan Internasional, terutama yang berfokus pada isu pertahanan tersebut memiliki pendapat yang berbeda dalam menjelaskan prasyarat agar kerjasama internasional industri pertahanan dapat berhasil. Secara garis besar sebagaimana yang disampaikan oleh DeVore & Stai (2019), Smith (2004), DeVore & Weiss (2014), Moravcsik (1993) dan Tucker (1991) terdapat empat kelompok prasyarat keberhasilan kerjasama internasional industri pertahanan. Hal ini dipengaruhi oleh *school of thought* dari masing-masing ahli, yakni konstruktivisme, institusionalisme, liberalisme dan realisme (Devore & Stai, 2019; DeVore & Weiss, 2014; Moravcsik, 1993; Tucker, 1991).

Menurut perspektif konstruktivis, negara-negara yang telah terlibat dalam kerja sama bilateral yang luas di berbagai bidang akan lebih mampu mencapai keberhasilan dalam kerja sama persenjataan (Smith, 2004). Kesamaan pemahaman dan karakteristik budaya dapat menjadi perekat yang kuat dalam kemitraan ini, membantu mereka mengatasi tantangan yang mungkin timbul (Smith, 2004).

Berbeda dengan pandangan konstruktivisme sebelumnya, pandangan institusionalisme berpandangan bahwa faktor ekonomi politik juga berperan penting dalam menentukan hasil kerjasama. Oleh karena itu,

penting untuk memperhatikan persamaan dan perbedaan ekonomi politik suatu negara. Ekonomi politik ini dapat diklasifikasikan menjadi ekonomi pasar liberal (LME), ekonomi pasar terkoordinasi (CME), ekonomi pasar campuran (MME) dan sistem ekonomi yang sangat dikontrol negara (*Statist Economy*), yang mempengaruhi kebijakan industri pertahanan suatu negara (Hall & Soskice, 2001). Ini menunjukkan bagaimana perbedaan ekonomi politik nasional membentuk kebijakan industri pertahanan suatu negara. Dalam hal kerja sama, institusionalis memperkirakan bahwa negara-negara dengan sistem ekonomi politik yang serupa akan mampu bekerja sama dengan lebih baik (DeVore, 2014; DeVore & Weiss, 2014).

Selain konstruktivisme dan institusionalisme, liberalisme juga diterapkan pada kerjasama persenjataan. Liberalisme berpandangan bahwa perusahaan memainkan peran sentral dalam kerja sama senjata. Keputusan yang diambil oleh para perusahaan di sektor pertahanan ini merupakan kunci dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program kerjasama tersebut (Moravcsik, 1993). Upaya *lobbying* oleh perusahaan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam dinamika kerja sama. Perusahaan dengan ukuran dan kompetensi inti yang serupa akan mengalami kesulitan dalam berkolaborasi karena cenderung bersaing satu sama lain untuk memperoleh keunggulan komparatif teknologi maupun ekonomi (Tucker, 1991).

Sedangkan menurut realis, kerja sama internasional pada dasarnya sulit karena adanya pertimbangan *relative gains*. Kekhawatiran bahwa negara mitra kerjasama akan memperoleh keuntungan atau manfaat lebih besar menjadi penghambat dalam upaya melakukan kerjasama. Terlebih lagi dalam konteks kerjasama industri pertahanan. Karakter persenjataan yang memiliki derajat kerahasiaan lebih tinggi serta berpengaruh terhadap daya gentar yang, menghadirkan *barrier* lebih besar untuk bekerjasama. Namun meski sulit, perspektif realis menyatakan bahwa kerjasama masih bisa dilakukan ketika terdapat ancaman yang sama. Kehadiran dan kesamaan ancaman yang kemudian berujung pada kehadiran aliansi dapat mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran tersebut. Hal ini dikarenakan kehadiran aliansi menghadirkan

kebutuhan peningkatan kekuatan militer seluruh negara anggota agar mampu menghadapi ancaman (Devore & Stai, 2019; Mcnaugher, 1983). Selain itu, dengan melakukan kerjasama pengembangan teknologi persenjataan, interoperabilitas militer atau keterpaduan militer dan persenjataan antar negara anggota juga akan meningkat (Güven & Yanik, 2012; Ringsmose, 2012).

Dalam konteks penelitian ini, penulis akan menggunakan prasyarat keberhasilan kerjasama industri pertahanan dari setiap perspektif. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk menawarkan kebaruan analisis, melainkan juga memberikan pemahaman yang lebih utuh terkait stagnasi ADIC. Penulis beranggapan bahwasanya stagnasi ADIC yang merupakan bagian dari kerjasama di bawah payung ASEAN perlu dilihat secara menyeluruh. Analisis dalam konteks penelitian ini membutuhkan tidak hanya analisis *dyadic* atau analisis antar negara anggota ADIC yang lebih ditekankan perspektif realis dan institusionalis serta liberalis, melainkan juga melihat pada level yang lebih besar yakni dalam tubuh organisasi regional ASEAN itu sendiri yang dihadirkan perspektif konstruktivis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Merujuk pada penjelasan Cristopher Lamont, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada koleksi data dan analisis strategi menggunakan data non-numerikal (Lamont, 2015). Melalui penelitian kualitatif diharapkan dapat memberikan pemahaman dan rasionalisasi terkait dengan suatu fenomena yang terjadi dalam lingkup politik internasional. Dalam konteks kajian hubungan internasional, pendekatan studi kasus menjadi sangat jamak digunakan. Hal ini dikarenakan penelitian dalam kajian hubungan internasional berupaya menjelaskan alasan mengenai satu fenomena yang spesifik (Lamont, 2015).

Pendekatan studi kasus sendiri dalam penelitian kualitatif didefinisikan sebagai *qualitative small-n research* (Blatter & Haverland, 2012). Pendekatan studi kasus memang memiliki kelemahan. Kelemahan dari pendekatan ini diantaranya adalah rawan untuk terjadinya *cherry picking* kasus. Senada dengan kelemahan tersebut, pendekatan studi

kasus juga dianggap sulit untuk di replikasi temuan-temuannya (Berg & Lune, 2012; Maoz, 2002). Namun penulis tetap menggunakan pendekatan ini dikarenakan menurut Blatter dan Haverland pendekatan studi kasus memiliki salah satu fitur utama, yakni untuk menunjukkan relasi antara pengamatan empiris yang konkrit dengan konsep-konsep teoretis yang abstrak (Blatter & Haverland, 2012). Terlebih lagi kerangka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini sudah jamak digunakan untuk analisis kasus serupa. Sehingga validitas temuan nanti dapat dipercaya.

Selanjutnya dalam metode penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data dan teknik analisis. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan riset berbasis internet (*internet-based research*). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Causal Process Tracing* (CPT). Menurut Blatter dan Haverland CPT merupakan pendekatan analitik yang memiliki dua elemen atau basis, yakni pemikiran konfiguratif dan konfigurasi kausal. CPT memiliki tujuan utama yang salah satunya adalah untuk mengetahui kondisi atau prasyarat apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa tertentu (Blatter & Haverland, 2012). Blatter dan Haverland kemudian menjelaskan bahwasanya CPT memiliki 2 macam teknik yang basis analisisnya menggunakan teori. Kedua macam teknik CPT tersebut adalah *causal combination* dan *causal mechanism*.

Dalam konteks penelitian ini penulis akan menggunakan *causal combination*. *Causal combination* menurut Blatter dan Haverland adalah model sebab-akibat yang dikombinasikan dari berbagai konfigurasi kausal lainnya. *Causal combination* kemudian juga bisa dipergunakan bersamaan dengan apa yang disebut dengan *causal conjunction* dan *additif configuration*. *Causal conjunction* merupakan variasi konfigurasi kausal di mana beberapa kondisi kausal bekerja pada waktu yang bersamaan (dalam cara aditif atau interaktif). Sedangkan *additif configuration* adalah teknik analisis yang memungkinkan semua faktor kausal tidak harus ada dalam menghasilkan peristiwa tertentu (*substitutable*) (Blatter & Haverland, 2012).

Dalam konteks penelitian ini maka CPT akan digunakan untuk melacak sekaligus

memetakan hubungan sebab-akibat stagnasi ADIC. Pemetaan hubungan sebab-akibat dalam artikel ini akan dilakukan dengan menggunakan empat prasyarat keberhasilan kerja sama industri pertahanan yang telah dijelaskan sebelumnya. Keempat prasyarat tersebut akan dilihat apakah memang menjadi alasan penyebab stagnasi ADIC. Dalam kata lain apakah keempat prasyarat tersebut merupakan konfigurasi kausal stagnasi ADIC. Jika proses analisa data baik yang didapatkan melalui internet ataupun wawancara sesuai dengan kerangka teori – keseluruhan ataupun sebagian – maka dapat dipetakan hubungan kausalitas atau sebab-akibat dalam kasus stagnasi ADIC.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Ekonomi Liberal-Kapitalis yang Tidak Seragam

Perspektif institusionalis memandang bahwasanya kerjasama pertahanan terutama dengan wujud kerjasama internasional industri pertahanan memiliki peluang berhasil yang besar jika terjalin antar negara dengan sistem ekonomi yang sama. Hal ini dikarenakan keseragaman sistem ekonomi yang diterapkan secara teoretis menempatkan kegiatan kerjasama pada proses dan rintangan yang serupa pada aspek birokrasi (DeVore, 2014; DeVore & Weiss, 2014). Oleh karena itu dalam bagian ini penulis akan melihat sistem ekonomi yang dianut oleh negara-negara ADIC.

Meninjau secara sederhana menggunakan dua lensa ekonomi yaitu liberalis-kapitalis dan sosialis, maka negara-negara ADIC dapat dikatakan memiliki keseragaman sistem ekonomi. Singapura, Malaysia, Thailand dan Indonesia saat ini disebutkan oleh banyak pihak menjalankan sistem ekonomi liberal-kapitalis (House, 1995; Kaewvarn, 2020; Kim, 2022; Ritchie, 2005; Suprijanto, 2020; Völgyi, 2019). Namun sebagaimana disampaikan oleh Hall dan Soskice (2001), pada dasarnya sistem ekonomi liberal-kapitalis masih memiliki beragam bentuk jika dilihat secara lebih detail. Bentuk-bentuk tersebut dimulai dari ekonomi pasar liberal (LME), ekonomi pasar terkoordinasi (CME), ekonomi pasar campuran (MME) hingga sistem ekonomi yang sangat dikontrol negara (*Statist Economy*) (Hall & Soskice, 2001).

Jika dilihat secara lebih dalam menggunakan klasifikasi sistem ekonomi liberal-kapitalis yang disampaikan Hall dan

Soskice. Maka didapati bahwa sistem ekonomi negara ADIC tidak seragam. Singapura dapat dikatakan menjalankan sistem ekonomi pasar liberal (LME) (Michigan State University, 2023c). Hal ini dikarenakan roda perekonomian Singapura benar-benar digerakkan oleh mekanisme pasar dan pemerintah tidak melakukan intervensi. Völgyi (2019) bahkan memberikan predikat Singapura sebagai contoh sukses kemajuan negara yang menjalankan ekonomi pasar bebas atau kapitalistik secara penuh (Völgyi, 2019).

Berbeda dengan Singapura, tiga negara ADIC lain yakni Indonesia, Malaysia dan Thailand meski menerapkan sistem ekonomi liberal-kapitalis, tidak dapat dikategorikan sebagai negara yang menjalankan sistem ekonomi pasar liberal (LME). Ketiga negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi negara yang menerapkan sistem ekonomi pasar campuran (MME) (Michigan State University, 2023a, 2023b, 2023d). Hal ini dikarenakan pemerintah ketiga negara masih memiliki kontrol yang cukup tinggi atau melakukan beberapa bentuk intervensi dalam kegiatan ekonomi dan industri (Michigan State University, 2023a, 2023b, 2023d). Bahkan, pada sektor industri pertahanan intervensi dan kontrol tersebut terlihat sangat jelas. Praktik di Indonesia dapat menjadi salah satu contoh, dimana menjadi kewajiban bagi Industri Pertahanan nasional agar mayoritas sahamnya dimiliki oleh entitas lokal. Kepemilikan mayoritas saham oleh pihak asing hanya diperbolehkan jika telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah (Triantama, 2023)

Mimpi Kerjasama Industri Pertahanan Dalam Suasana Kompetitif

Beralih pada pemikiran kaum liberalis, terdapat satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan kerjasama internasional industri pertahanan. Faktor penentu keberhasilan tersebut bersumber dari internal entitas industri pertahanan itu sendiri. Hal ini menjadi sangat rasional dalam sudut pandang liberalis dikarenakan kegiatan ekonomi termasuk pengembangan teknologi persenjataan dan penjualannya dilakukan oleh industri, bukan negara (Moravscik, 1993). Perspektif ini menyatakan bahwa jika industri pertahanan yang bekerjasama memiliki kapasitas yang setara maka kerjasama akan sulit berjalan

(Tucker, 1991). Oleh karena itu guna menjawab pertanyaan penelitian artikel ini, perlu untuk melihat bagaimana kapasitas industri pertahanan negara-negara anggota ADIC.

Dalam konteks penelitian ini, penulis menemukan fakta bahwasanya kapasitas industri pertahanan negara-negara anggota ADIC relatif setara. Argumentasi ini didasarkan pada analisis para ahli serta kondisi empiris. Secara empiris, kapasitas industri pertahanan negara-negara ADIC dapat dikatakan setara dikarenakan merujuk pada data yang dirilis oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). SIPRI setiap tahunnya mempublikasikan peringkat 100 besar industri pertahanan dunia. Berdasarkan data SIPRI tersebut tidak ada industri pertahanan dari Indonesia, Malaysia dan Thailand yang masuk jajaran elit 100 besar dunia (SIPRI, 2023a). Hal ini dapat dipahami mengingat produk-produk yang dihasilkan industri pertahanan tiga negara tersebut cenderung berada pada tingkatan teknologi yang sama, seperti kendaraan angkut personel (*Armored Personnel Carrier / APC*) atau kendaraan tempur infantri (*Infantry Fighting Vehicles / IFVs*). Jika Indonesia dikenal sebagai produsen Panser Anoa maka Malaysia dikenal sebagai produsen DefTech AV8 *Gempita*, sedangkan Thailand memproduksi APC First Win (SIPRI, 2023b).

Berbeda dengan kondisi tiga negara anggota ADIC lainnya yang relatif setara, kapasitas industri pertahanan Singapura mengungguli cukup jauh. Merujuk pada pemeringkatan yang dilakukan SIPRI, Industri pertahanan Singapura yakni ST Technology sejak ADIC berdiri selalu masuk dalam jajaran 100 besar industri pertahanan dunia. Keberhasilan ST Technology masuk ke dalam jajaran 100 besar dunia tidak terlepas dari kemampuan ST Technology mengembangkan sekaligus menjual teknologi persenjataan mutakhir. ST Technology tercatat telah mampu memproduksi kapal Multi Role Combat Vessels (MRCV) Vanguard 130 yang akan menjadi kapal perang terbesar yang dibangun di Asia Tenggara (ST Engineering, 2023b). Singapura juga telah mampu memproduksi Artileri Swagerak kaliber besar yakni Primus 155mm (ST Engineering, 2023).

Meskipun secara empiris kapasitas industri pertahanan Singapura terlihat memiliki keunggulan dibanding negara ADIC

lainnya, hal ini tidak meruntuhkan argumentasi penulis, yakni salah satu penyebab ADIC mengalami stagnansi adalah kapasitas industri pertahanan anggota ADIC setara. Hal ini dikarenakan ketika merujuk pada hierarki kemampuan produksi senjata yang disampaikan para ahli, seluruh negara ADIC masih berada pada tingkat atau *tier* yang sama. Keith Krause dan Richard Bitzinger dalam buku dan artikelnya menyatakan bahwa kapasitas industri pertahanan dunia dapat dibagi kedalam 3 *tier*. *Tier* pertama adalah negara yang memiliki kemampuan inovator kunci (*critical innovators*) yang menjadi penggagas utama pengembangan teknologi persenjataan. Negara Negara yang masuk dalam kategori ini adalah Amerika Serikat yang mampu melakukan dan Uni Soviet atau Rusia. Kedua negara tersebut telah berulang kali memimpin inovasi teknologi persenjataan seperti pada teknologi anti-radar (*stealth*) ataupun kapal selam nuklir (R. Bitzinger, 2015; R. A. Bitzinger, 2003; Krause, 1992).

Tier kedua adalah negara pengadopsi (*adapter*) dan pemodifikasi (*modifier*) dari teknologi persenjataan mutakhir. Pada *tier* ini Krause dan Bitzinger memiliki perbedaan pendapat. Krause berpendapat *tier* dua terdiri dari negara Eropa (Krause, 1992). Sementara Bitzinger membagi *tier* dua ke dalam tiga *sub-tier*, yakni *sub-tier* 2a yang merupakan kelompok industri maju (Australia, Kanada, Norwegia, Jepang), *sub-tier* 2b yakni negara industri baru (Argentina, Brasil, Indonesia, Iran, Israel, Singapura, Afrika Selatan), serta *sub-tier* 2c yakni negara dengan kapasitas industri mumpuni tapi memiliki keterbatasan dalam penelitian dan pengembangan (India dan Tiongkok) (R. Bitzinger, 2015; R. A. Bitzinger, 2003). Sedangkan, *tier* ketiga adalah negara dengan kapasitas sangat terbatas dan hanya memproduksi teknologi sederhana (R. Bitzinger, 2015; R. A. Bitzinger, 2003; Krause, 1992). Negara-negara yang berada pada kategori atau *tier* ketiga ini diantaranya adalah Mesir dan Nigeria. Kedua negara tersebut hanya memiliki kemampuan memproduksi senjata berkaliber kecil (R. Bitzinger, 2015; R. A. Bitzinger, 2003).

Merujuk pada analisis dua ahli terkemuka dalam bidang ekonomi pertahanan tersebut, maka kapasitas negara-negara ADIC dapat dipastikan berada pada *tier* yang sama. Indonesia dan Singapura bahkan sudah secara

eksplisit disebutkan oleh Bitzinger berada pada *tier* yang sama yakni *sub-tier* 2b. Dua negara anggota ADIC lain yakni Malaysia dan Thailand ketika dianalisis juga akan menempati *sub-tier* 2b. Hal ini dikarenakan karakter industri pertahanan dua negara tersebut sama dengan Indonesia dan Singapura, yakni belum mampu menjadi *critical innovator* (*tier* 1) akan tetapi telah memiliki kemampuan memproduksi teknologi yang tidak sederhana, contohnya adalah memproduksi APC dan IFVs. Sedangkan jika merujuk pemikiran Krause (1992), maka seluruh negara anggota ADIC berada pada *tier* 3. Fakta dan analisis yang menunjukkan negara-negara ADIC memiliki kapasitas industri pertahanan yang setara ini sesuai dengan argumentasi teoretis yang digunakan dalam artikel ini. ADIC tidak mampu mencapai kemajuan karena industri pertahanan negara anggota memiliki kapasitas setara.

Analisis ini sejalan dengan argumentasi dari Reine Prihandoko, selaku analis utama Politik-Keamanan Laboratorium Indonesia 2045. Menurut Reine, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk didalamnya anggota ADIC secara umum memiliki kesamaan tingkat kemampuan industri pertahanan. Meskipun kemudian masing-masing negara memiliki ceruk kemampuan yang lebih baik pada beberapa jenis teknologi persenjataan.

Intensitas Kerjasama: “ASEAN WAY” Sebagai Penghambat

Perspektif konstruktivis memandang bahwasanya keberhasilan kerja sama internasional industri pertahanan turut dipengaruhi oleh intensitas kerja sama pada sektor lain. Ketika negara yang terlibat kerja sama industri pertahanan memiliki rekam jejak dan intensitas kerja sama yang baik dengan negara mitra, maka peluang berhasil tinggi, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu analisis pada bagian ini akan melihat bagaimana intensitas kerja sama yang terjalin antara negara-negara ADIC. Dikarenakan ADIC merupakan bagian dari instrumen kerjasama ASEAN maka perlu untuk melihat bagaimana keberhasilan kerja sama ASEAN pada sektor-sektor lainnya.

ASEAN sebagai suatu organisasi regional memiliki berbagai inisiatif kerjasama. Inisiatif kerjasama ASEAN mencakup dimensi politik-keamanan, ekonomi maupun sosial-budaya. ASEAN bahkan memiliki visi untuk menjelma

menjadi suatu komunitas bersama pada setiap dimensi tersebut, sehingga kemudian dikenal istilah ASEAN Political-Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Visi membentuk komunitas atau masyarakat ASEAN melalui tiga pilar tersebut pada awalnya ditargetkan untuk dapat tercapai pada tahun 2015. Namun pada kenyataannya visi membentuk komunitas atau masyarakat ASEAN tersebut tidak tercapai. ASEAN kemudian memutuskan untuk menunda pembentukan Masyarakat ASEAN menjadi tahun 2025 (ASEAN, 2015). Namun ahli menyatakan bahwasanya kemungkinan ASEAN mampu mencapai visi Masyarakat ASEAN 2025 juga tidak akan tercapai (Menon & Cassandra Melendez, 2023)

Selain kegagalan ASEAN membentuk Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 dan prediksi para ahli yang turut menyangsikan tercapainya visi tersebut pada tahun 2025, inisiatif kerjasama ASEAN lain juga dianggap tidak berjalan dengan baik. Upaya ASEAN untuk membangun kerja sama multilateral pada dimensi politik-keamanan dianggap tidak berhasil atau minimal tidak efektif (Tan, 2020). Tan (2020) dalam tulisannya menyatakan bahwasanya inisiasi kerja sama multilateral yang coba dilakukan oleh ASEAN seperti ASEAN Regional Forum (ARF) tidak efektif dikarenakan ASEAN gagal menunjukkan kepemimpinannya yang sebenarnya sangat diperlukan agar multilateralisme di Asia-Pasifik berjalan (Tan, 2020). Kegagalan tersebut disebabkan oleh dua hal. Pertama, karakter ASEAN yang mengedepankan prinsip konsensus sehingga menciptakan ketidakefektifan pada institusi ASEAN itu sendiri (Tan, 2020).

Kedua, Masih lemahnya kesatuan atau soliditas negara ASEAN. Rendahnya soliditas diantara negara-negara ASEAN ini disebabkan oleh *distrust* diantara negara anggota ASEAN (Tan, 2020). Rendahnya soliditas di dalam tubuh ASEAN ini juga diamini oleh Jurgen Ruland. Menurut Ruland (2020), ASEAN gagal menciptakan sekaligus tidak memiliki soliditas dan kohesivitas yang cukup. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapat yang kerap terjadi antara negara-negara ASEAN dalam forum-forum PBB (Ruland, 2020). *Distrust* dan tidak solidnya negara anggota ASEAN tentunya menyulitkan kerja sama dalam kerangka

ASEAN bisa berjalan karena setiap pengambilan keputusan di ASEAN wajib disetujui oleh seluruh anggota ASEAN.

Analisis ini juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Reine Prihandoko. Menurut Reine, negara-negara anggota ASEAN masih belum bersatu secara solid. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, terdapat perselisihan mengenai klaim atas Laut China Selatan di antara beberapa negara anggota ASEAN. Kedua, kerja sama di ASEAN yang bersifat *non-binding* yang membuat negara anggota tidak terikat secara hukum untuk mengimplementasikan keputusan bersama atau kesepakatan yang dibuat.

Keanggotaan ADIC: Kuatnya *Distrust* dan Rendahnya Soliditas Anggota

Konflik antara Indonesia dan Malaysia sudah berlangsung sejak lama. Salah satu konflik utama adalah sengketa kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan di Laut Sulawesi. Kedua pulau tersebut diklaim oleh Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 1998, kasus ini dibawa ke Mahkamah Internasional dengan alasan bahwa kedua pulau itu berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982. Namun pada 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedua pulau itu berada dalam kedaulatan Malaysia, karena Malaysia telah menunjukkan bukti efektivitas penguasaan yang cukup atas wilayah tersebut. Keputusan ini menuai kritik dari Indonesia (Novitasari, 2021).

Konflik lain antara Indonesia dan Malaysia adalah sengketa perbatasan laut di Blok Ambalat di Laut Sulawesi. Blok minyak dan gas ini juga diklaim oleh Indonesia dan Malaysia. Ketegangan memuncak pada tahun 2005 ketika kapal perang kedua negara saling mengunci senjata di perairan Ambalat. Untuk meredakan ketegangan, disepakati moratorium patroli militer gabungan di kawasan Ambalat pada 2006 dan berbagai langkah-langkah lainnya (Bakhtiar, 2015). Namun, hingga kini status Blok Ambalat belum terselesaikan. Salah satu konflik paling besar lainnya adalah Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963-1966 pada masa Presiden Sukarno. Konfrontasi ini dipicu oleh pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap sebagai neo-kolonialisme Inggris. Indonesia

menentang pembentukan Malaysia, menganggapnya sebagai ancaman terhadap Indonesia dan juga konsep Maphilindo. Selama konfrontasi, terjadi beberapa insiden pertempuran antara tentara Indonesia dan Malaysia di perbatasan Kalimantan. Malaysia didukung oleh Inggris, Australia dan Selandia Baru. Konfrontasi berakhir setelah tragedi G30S dan lengsernya Presiden Sukarno, digantikan Presiden Soeharto (Perdana & Melay, 2016).

Hubungan Indonesia dan Singapura pun sempat tegang pada tahun 1960-an. Salah satu insiden utama adalah pengeboman MacDonald House di Singapura oleh 2 tentara Indonesia pada Maret 1965. Insiden ini terjadi di tengah konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dua komando Indonesia, Osman bin Haji Mohamed Ali dan Harun bin Said, dikirim untuk mengebom pangkalan militer dan fasilitas Inggris di Singapura. Namun mereka justru meledakkan bom di MacDonald House yang menewaskan 2 orang dan melukai 33 orang. Keduanya diadili dan dihukum gantung di Changi Prison Singapura pada 1968 (Wei & Chua, 2015). Singapura menganggapnya sebagai tindakan terorisme, sementara Indonesia menyebutnya sebagai operasi militer. Peristiwa ini meninggalkan trauma mendalam bagi Singapura. Bahkan 50 tahun kemudian pada 2015, perdana menteri Lee Hsien Loong dalam pidatonya masih mengingatkan rakyat Singapura untuk waspada terhadap ancaman terorisme akibat insiden MacDonald House ((Wei & Chua, 2015). Hubungan kedua negara kembali memanas pada 1998 ketika Presiden BJ Habibie menyebut Singapura sebagai "titik merah kecil" yang majemuk dan tidak seragam penduduknya. Pernyataan ini dinilai merendahkan dan rasis oleh Singapura. Habibie kemudian meminta maaf dan menjelaskan maksudnya adalah ukuran Singapura yang kecil. Walau setelahnya membuat negara Singapura berkembang, insiden ini telah membuka kembali luka di antara kedua negara (Hannerz & Gingrich, 2017).

Malaysia dan Singapura pun yang merupakan satu kesatuan sebelumnya, kini memiliki sejumlah konflik perbatasan. Salah satu sengketa utama adalah status kepemilikan Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca di Selat Singapura. Pedra Branca secara historis diklaim oleh Malaysia sebagai bagian Johor. Namun pada 2008, Mahkamah Internasional

memutuskan pulau sebesar 0,6 km persegi ini dimiliki Singapura setelah mempertimbangkan bukti-bukti efektivitas penguasaan wilayah oleh Inggris dan Singapura sejak 1850-an (Bahri, 2011). Meski kecewa, Malaysia menerima keputusan tersebut demi menjaga hubungan baik dengan Singapura. Sengketa lain terjadi baru-baru ini, yaitu pada 2018, Malaysia mengumumkan rencana perluasan fasilitas pelabuhan Johor Bahru, termasuk pembangunan Terminal Kontainer Baru yang mampu menampung kapal-kapal kontainer berukuran besar. Namun, rencana perluasan ini ditentang oleh pihak berwenang Singapura karena berpotensi mengganggu alur pelayaran di Selat Johor. Singapura menyatakan bahwa Malaysia seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan rencana pembangunan pelabuhan. Malaysia menolak klaim ini. Kedua negara kemudian terlibat konflik bilateral terkait rencana perluasan pelabuhan (Bachzan, 2019).

Selain itu, konflik bersenjata di provinsi Pattani di Thailand selatan telah berlangsung puluhan tahun. Separatis Muslim di Pattani ingin melepaskan diri dari Thailand yang mayoritas Buddha. Pemerintah Thailand menuduh Malaysia diam-diam mendukung dan membantu para pemberontak Pattani. Tuduhan ini karena banyak pemberontak berlindung di Malaysia setelah melakukan serangan di Thailand. Malaysia sendiri membantah tuduhan tersebut dan menyatakan akan bekerja sama dengan Thailand untuk mengatasi masalah di perbatasan. Namun ketegangan tetap ada, Thailand beberapa kali mengancam akan membalas Malaysia jika negara tetangga itu terus mendukung pemberontakan (Saidin, 2020). Konflik yang berlarut-larut ini belum menemui titik terang hingga kini.

Dari uraian konflik-konflik antar negara ASEAN tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antar negara di kawasan ini memang selalu diwarnai ketegangan dan konflik. Meski sekarang tergabung dalam komunitas ASEAN, pada dasarnya negara-negara di kawasan ini tidaklah selalu bersahabat. Sejarah panjang pertentangan dan rasa curiga masih membekas hingga kini, seperti terlihat dari berlarutnya sengketa perbatasan dan wilayah antara Indonesia-Malaysia-Singapura. Demikian pula konflik etnis dan separatisme di Thailand Selatan dan Filipina Selatan yang turut

melibatkan Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 1960-an juga meninggalkan trauma mendalam. Perbedaan ideologi dan kepentingan nasional, warisan sejarah kolonialisme, serta konflik etnis-agama ikut memperkeruh hubungan. Meski telah merdeka puluhan tahun, negara-negara di kawasan ini sepertinya masih belum bisa melepaskan diri dari bayang-bayang sejarah konflik dan memunculkan rasa tidak percaya atau *distrust* (Emmers, 2017; Ruland, 2020).

Distrust yang terus hadir ini akan membawa kerugian dalam upaya negara melakukan kerja sama pertahanan. Hal ini dikarenakan *distrust* antar negara akan turut meningkatkan pertimbangan *relative gains*. Padahal, adanya kekhawatiran negara bahwa dalam suatu kerja sama pihak lain akan memperoleh keuntungan yang lebih besar tersebut menjadi batu sandungan terjadinya kerja sama (Axelrod & Keohane, 1985). Terlebih lagi dalam kerangka kerja sama pertahanan dan industri pertahanan layaknya ADIC (Calcara, 2018). Hal ini tidak terlepas dari sensitifitas isu yang terdapat dalam kerja sama industri pertahanan, seperti kelemahan teknologi persenjataan yang digunakan suatu negara.

Oleh karena itu, ketika kita melihat berbagai kerja sama industri pertahanan yang berhasil berjalan seperti pengembangan Eurofighter Typhoon ataupun jet tempur F-35, maka negara yang terlibat adalah negara aliansi atau mitra strategis (Bağcı & Kurç, 2017; Calcara, 2018; Feldman, 1984; Güven & Yanık, 2012; Hagelin, 1978; Ringsmose, 2012). Hal ini dikarenakan ketika negara telah berada dalam satu aliansi yang sama ataupun telah menjadi mitra strategis maka *distrust* diantara negara-negara tersebut relatif rendah.

Temuan penulis pada bagian ini juga diamini oleh Reine Prihandoko. Reine menyatakan bahwasanya negara-negara yang tergabung di dalam ASEAN dan ADIC memiliki beberapa persoalan yang menyebabkan *distrust* satu dengan yang lainnya. Reine menyoroti dua hal sebagai penyebab *distrust* yang menyulitkan kerja sama ADIC. Pertama, faktor historis. Sejarah konflik yang terjalin antar negara menyebabkan masih ada rasa saling tidak percaya. Namun menurut Reine faktor konflik di masa lalu ini relatif tidak begitu kuat pengaruhnya. Menurut Reine, yang paling berperan dalam menghadirkan *distrust*

adalah dinamika hubungan yang terjadi saat ini. Reine terutama menyoroti mengenai sengketa teritorial di Laut China Selatan.

Kemustahilan Kerjasama Industri Pertahanan Tanpa Aliansi

Faktor penentu keberhasilan kerjasama internasional industri pertahanan terakhir yang akan dibahas pada penelitian ini adalah keberadaan aliansi. Bagi pemikiran realis, kerjasama akan sangat sulit dijalankan jika negara yang terlibat tidak tergabung dalam suatu aliansi. Hal ini dikarenakan keberadaan aliansi mendorong kebutuhan untuk meningkatkan kekuatan militer seluruh negara anggota agar mampu menghadapi ancaman (Devore & Stai, 2019; McNaugher, 1983). Selain itu, dengan melakukan kerjasama pengembangan teknologi persenjataan, interoperabilitas militer antar negara anggota juga akan meningkat (Güven & Yanık, 2012; Ringsmose, 2012).

Dalam konteks penelitian ini tentu saja stagnasi yang terjadi pada ADIC menjadi sudah sangat bisa diprediksi sebelumnya. Hal ini mengingat di dalam Kawasan Asia Tenggara tidak terdapat aliansi. Negara-negara yang terlibat didalam ADIC ini tidak berada pada satu aliansi pertahanan. Aliansi juga sepertinya akan sangat sulit untuk dibentuk antar negara-negara ADIC. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh kebijakan Indonesia yang menerapkan prinsip politik bebas-aktif dan non-blok saja, melainkan karena ketiadaan kesamaan persepsi antar negara ADIC. Merujuk pada data yang dirilis oleh ASEAN Studies Centre ISEAS-Yusof Ishak Institute, diantara 4 negara ADIC memiliki perbedaan persepsi berkaitan dengan pemihakan kepada Tiongkok atau Amerika Serikat. Persepsi publik Indonesia (53,7%) dan Malaysia (54,8%) lebih condong untuk memihak pada Tiongkok (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2023). Sedangkan Singapura (38,9%) dan Thailand (43,1%) lebih memihak pada Amerika Serikat (ISEAS-Yusof Ishak Institute, 2023). Perlu juga untuk diingat bahwasanya sebagaimana pemaparan bagian sebelumnya, sesama negara anggota ADIC ini bahkan masih memiliki berbagai permasalahan satu dengan yang lainnya.

Ketiadaan aliansi sebagai akibat dari perbedaan persepsi serta dinamika hubungan antar negara ADIC yang masih menyimpan berbagai persoalan menyulitkan keberhasilan

kerjasama ADIC. Negara-negara ADIC akan sangat berhati-hati dalam melakukan kerjasama industri pertahanan karena mereka harus mempertimbangkan faktor *relative gains*. Sebagai negara yang masih menyimpan potensi konflik maka negara ADIC tidak ingin negara lain memiliki kekuatan yang setara atau bahkan melebihi dirinya sendiri. Selain itu, ketiadaan aliansi ini juga mengakibatkan tidak ada dorongan mendesak bagi ADIC untuk menciptakan teknologi persenjataan yang sama guna meningkatkan interoperabilitas antar negara. Hal ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyebutkan sulit bagi ADIC menentukan teknologi persenjataan yang perlu dikembangkan bersama-sama (Ningsih, 2019; Raghavan & Ben-Ari, 2011).

Pandangan penulis mengenai pengaruh keberadaan aliansi terhadap kerja sama industri pertahanan searah dengan apa yang disampaikan oleh Reine Prihandoko. Menurut Reine, keberadaan aliansi juga merupakan hal yang vital dalam menentukan apakah kolaborasi industri pertahanan bisa berjalan lancar atau tidak. Dalam konteks penelitian ini, negara-negara yang tergabung dalam ADIC tidak tergabung dalam aliansi yang sama, bahkan negara-negara anggota ADIC memiliki kecenderungan kedekatan dengan negara extra kawasan yang berbeda.

SIMPULAN

ASEAN Defense Industrial Cooperation (ADIC) sebagai terobosan kerjasama pertahanan di Asia Tenggara telah disepakati sejak tahun 2011. Namun sayangnya hingga saat ini, impian tersebut selayaknya peribahasa bagai punuk merindukan bulan. ADIC tidak lebih dari sekedar macan kertas yang terlihat begitu ideal diatas kertas. Hingga 12 tahun setelah ADIC disepakati, tidak ada satu kemajuan yang berarti. Merujuk salah satu poin tujuan pembentukan ADIC yaitu mengembangkan teknologi persenjataan bersama, hingga saat ini jenis teknologi yang akan dikembangkan tidak pernah disepakati. Stagnansi ADIC ini ternyata bukan hal yang mengejutkan. ADIC hanya menjadi sebuah kertas disebabkan oleh tidak tersedianya cukup prasyarat agar kerjasama industri pertahanan berhasil.

Pertama, Identitas yang disematkan satu negara anggota ADIC kepada negara anggota ADIC yang lain tidak selalu sebagai negara

sahabat. Sebagai akibat dari sejarah masa lalu dan persaingan ekonomi serta politik sesama negara anggota ADIC menganggap satu sama lain sebagai ancaman atau setidaknya kompetitor. Kedua, karakter kerjasama dalam lingkup ASEAN yang *non-binding* mengakibatkan sulit untuk mengikat komitmen politik masing-masing negara untuk menjalankan langkah-langkah konkret kerjasama ini. Ketiga, kapasitas industri pertahanan nasional mayoritas negara anggota ADIC yang relatif setara menyebabkan kuatnya nuansa persaingan antar pelaku industri tersebut. Kapasitas inovasi dan produksi yang setara ini menyebabkan pertimbangan *relative gains* menguat. Penyebab keempat dan juga menjadi sangat determinantal adalah negara-negara anggota ADIC tidak terikat pada satu aliansi pertahanan. Keberadaan aliansi pertahanan menjadi sangat menentukan keberhasilan kerjasama industri pertahanan karena mampu mereduksi pertimbangan *relative gains* antar negara. Selain itu aliansi juga akan meningkatkan urgensi hadirnya suatu teknologi persenjataan yang memiliki interoperabilitas tinggi di dalam aliansi tersebut. Kelima, sistem ekonomi yang dijalankan negara-negara ADIC tidak seragam.

Guna memaksimalkan kerangka kerja sama ADIC ditengah berbagai penghambat yang ada, maka penulis menghadirkan beberapa rekomendasi solusi. Pertama, negara ADIC juga perlu mempertimbangkan untuk lebih dul berfokus pada pengembangan kemampuan industri pertahanan untuk di integrasikan pada rantai pasok global terlebih dahulu, alih-alih mengejar kemampuan produksi teknologi persenjataan dari awal. Kedua, jika memang masih mengejar ambisi melakukan produksi teknologi persenjataan bersama, maka negara ADIC perlu menemukan *commonality* atau kesamaan jenis teknologi persenjataan yang akan mendekati fase akhir masa pakai. Hal ini dimaksudkan agar negara anggota ADIC dapat menentukan jenis teknologi persenjataan yang akan dikembangkan bersama.

Meski penelitian ini telah menghadirkan empat alasan mengapa ADIC tidak mampu beranjak dari statusnya sebagai macan kertas, masih terdapat kebutuhan untuk kajian lanjutan. Penelitian lanjutan terkait ADIC perlu dilakukan dengan mempertimbangkan dampak dari konflik Rusia – Ukraina yang dalam berbagai riset menghadirkan guncangan pada

rantai pasok senjata dunia. Perlu untuk dilihat apakah kondisi ini kedepannya akan mampu menjadi katalis bagi implementasi kerjasama industri pertahanan di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wicaksono. (2022). Interest Analysis of Indonesian Defense Diplomacy in ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC). *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 9(2), 362–375. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v9i2.226>
- Aini, R. Q., & Triantama, F. (2021). The Implementation of South Korea's Military Technology Reform in The Perspective of Techno-nationalism. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 7(1). <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i1.14581>
- ASEAN. (2015). ASEAN COMMUNITY VISION 2025.
- Axelrod, R., & Keohane, R. O. (1985). Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions. *Source: World Politics*, 38(1), 226–254.
- Bachzan, A. (2019). SENGKETA KEBIJAKAN PELABUHAN JOHOR MALAYSIA DAN SINGAPURA PADA TAHUN 2018 SKRIPSI.
- Bağcı, H., & Kurç, Ç. (2017). Turkey's strategic choice: buy or make weapons? *Defence Studies*, 17(1), 38–62. <https://doi.org/10.1080/14702436.2016.1262742>
- Bahri, S. (2011). SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS PADANG 2011 TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PULAU BATU PUTEH (PEDRA BRANCA) ANTARA MALAYSIA-SINGAPURA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL TAHUN 2008.
- Bakhtiar, I. (2015). PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DIWILAYAH AMBALAT MENURUT HUKUM LAUT INTERNASIONAL. <http://nasional.kompas.com/read/2008/>
- Balakrishnan, K., & Bitzinger, R. A. (2012). Asean Defence Industrial Collaboration: Getting to Yes. *Dalam RSIS Commentaries* (232; RSIS Commentaries, Nomor 67906982).
- Balakrishnan, K., & Matthews, R. (2009). the Role of Offsets in Malaysian Defence Industrialisation. *Defence and Peace Economics*, 20(4), 341–358. <https://doi.org/10.1080/10242690802333117>
- Benoit, E. (1978). Growth and Defense in Developing Countries. *Economic Development and Cultural Change*, 26(2), 271–280.
- Berg, B. L. (Bruce L., & Lune, H. (2012). Qualitative research methods for the social sciences. Pearson.

- Bitzinger, R. (2015). New Ways of Thinking About the Global Arms Industry: Dealing With "Limited Autarky." *ASPI Strategic Insights*, 98.
- Bitzinger, R. A. (2003). *Towards a Brave New Arms Industry*. Routledge.
- Bitzinger, R. A. (2011). China's defense technology and industrial base in a regional context: Arms manufacturing in Asia. *Journal of Strategic Studies*, 34(3), 425–450. <https://doi.org/10.1080/01402390.2011.574985>
- Bitzinger, R. A. (2013). Revisiting armaments production in Southeast Asia: New dreams, same challenges. *Contemporary Southeast Asia*, 35(3), 369–394. <https://doi.org/10.1355/cs35-3c>
- Bitzinger, R. A. (2015). Defense Industries in Asia and the Technonationalist Impulse. *Contemporary Security Policy*, 36(3), 453–472. <https://doi.org/10.1080/13523260.2015.1111649>
- Bitzinger, R. A. (2017). Asian arms industries and impact on military capabilities. *Defence Studies*, 17(3), 295–311. <https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1347871>
- Bitzinger, R. A., & Kim, M. (2005). Why do small states produce arms? The case of South Korea. *Korean Journal of Defense Analysis*, 17(2), 183–205. <https://doi.org/10.1080/10163270509464089>
- Blatter, J., & Haverland, M. (2012). *Designing Case Studies: Explanatory Approaches in Small-N Research* (1 ed.). Palgrave Macmillan.
- Calcara, A. (2018). Cooperation and conflict in the European defence-industrial field: the role of relative gains. *Defence Studies*, 18(4), 474–497. <https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1487766>
- Calcara, A. (2020). Cooperation and non cooperation in European defence procurement. *Journal of European Integration*, 42(6), 799–815. <https://doi.org/10.1080/07036337.2019.1682567>
- CNN Indonesia. (2020). Diancam AS, RI Terancam Batal Beli Sukhoi Su-35 Rusia. *CNN Indonesia: Berita ASEAN*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200317132132-106-484174/diancam-as-ri-terancam-batal-beli-sukhoi-su-35-rusia>
- DeVore, M. R. (2014). International armaments collaboration and the limits of reform. *Defence and Peace Economics*, 25(4), 415–443. <https://doi.org/10.1080/10242694.2013.793530>
- Devore, M. R., & Stai, N. K. (2019). When Collaboration Works. *European Review of International Studies*, 6(2), 18–42. <https://doi.org/10.2307/26860760>
- DeVore, M. R., & Weiss, M. (2014). Who's in the cockpit? The political economy of collaborative aircraft decisions. *Review of International Political Economy*, 21(2), 497–533. <https://doi.org/10.1080/09692290.2013.787947>
- Dilahwangsa, Z., Bhakti, I. N., & Pedrasan, R. (2019). Asean Defense Industry Collaboration (ADIC) as Medium of Defense Diplomacy of Asean Member Countries. *Diplomasi Pertahanan*, 5, 1–28.
- Emmers, R. (2017). Enduring Mistrust and Conflict Management in Southeast Asia: An Assessment of ASEAN as a Security Community. *TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia*, 5(1), 75–97. <https://doi.org/10.1017/trn.2016.24>
- Feldman, J. (1984). Collaborative Production of Defense Equipment Within NATO. *Journal of Strategic Studies*, 7(3), 282–300. <https://doi.org/10.1080/01402398408437191>
- Güven, S., & Yanık, L. K. (2012). Turkey ' s involvement in the F-35 program. 68(1), 111–129.
- Hagelin, B. (1978). One for All or Four for the Fifth: Standardization and the F-16 in Europe. *Cooperation and Conflict*, 13(2), 133–146. <https://doi.org/10.1177/001083677801300204>
- Hall, P. A., & Soskice, D. (2001). Introduction to Varieties of Capitalism. Dalam P. A. Hall & D. Soskice (Ed.), *Varieties of Capitalism* (hlm. 1–68). Oxford University Press.
- Hannerz, U., & Gingrich, A. (2017). *Small Countries*.
- Herrera, M., & Matthews, R. (2014). Latin America in step with global defence offset phenomenon. *RUSI Journal*, 159(6), 50–57. <https://doi.org/10.1080/03071847.2014.990815>
- House, Q. E. (1995). MALAYSIA: INDUSTRIAL SUCCESS AND THE ROLE OF THE GOVERNMENT SANJAYA LALL. Dalam *Journal of International Development* (Vol. 7, Nomor 5).
- ISEAS-Yusof Ishak Institute. (2023). *The State of the Southeast Asia 2023*.
- Kaewvarn, S. (2020). Labour Unity Against Global Capitalism: Create a New Society and People's Democracy. *International Union Rights*, 27(4), 20–21. <https://doi.org/10.1353/iur.2020.a838143>
- Kim, K. (2022). Key Features of Indonesia's State Capitalism Under Jokowi. *Journal of ASEAN Studies*, 10(2), 207–226. <https://doi.org/10.21512/jas.v10i2.9075>
- Kinne, B. J. (2016). Agreeing to arm: Bilateral weapons agreements and the global arms trade. *Journal of Peace Research*, 53(3), 359–

377.
<https://doi.org/10.1177/0022343316630037>
- Kinsella, D. (1998). Arms Transfer Dependence and Foreign Policy Conflict. *Journal of Peace Research*, 35(1), 7–23.
- Krause, K. (1991). Military Statecraft: Power and Influence in Soviet and American Arms Transfer Relationships. *International Studies Quarterly*, 35(3), 313.
<https://doi.org/10.2307/2600702>
- Krause, K. (1992). *Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade*. Cambridge University Press.
- Kurc, C., & Oktay, S. (2018). Taking production relations seriously: the role of defence firms in armaments cooperation. *European Security*, 27(4), 469–489.
<https://doi.org/10.1080/09662839.2018.1520699>
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in Politics and International Relations*. Sage Publications.
- Maoz, Z. (2002). Case study methodology in international studies: from storytelling to hypothesis testing. Dalam F. P. Harvey & M. Brecher (Ed.), *Evaluating Methodology in International Studies*. University of Michigan Press.
- Mcnaugher, T. L. (1983). Problems of Collaborative Weapons Development: The MBT-70. *Armed Forces & Society*, 10(1), 123–145.
<https://doi.org/10.1177/0095327X8301000106>
- Mearsheimer, J. J. (2001). *The Tragedy of Great Power Politics*. W.W. Norton & Company.
- Menon, J., & Cassandra Melendez, A. (2023). Will 2025 be the final deadline for the ASEAN Economic Community? ADB Institute.
<https://www.asiapathways-adbi.org/wp-content/uploads/2017/08/will-2025-be-the-final-deadline-asean-economic-community.pdf>
- Michigan State University. (2023a). Indonesia: Introduction. GlobalEDGE.
<https://globaledge.msu.edu/countries/indonesia>
- Michigan State University. (2023b). Malaysia: Introduction. GlobalEDGE.
<https://globaledge.msu.edu/countries/malaysia>
- Michigan State University. (2023c). Singapore: Introduction. GlobalEDGE.
<https://globaledge.msu.edu/countries/singapore>
- Michigan State University. (2023d). Thailand: Introduction. GlobalEDGE.
<https://globaledge.msu.edu/countries/thailand>
- Moravcsik, A. (1993). Armaments Among Allies: European Weapons Collaboration, 1975–1985. Dalam P. B. Evans, H. K. Jacobson, & R. D. Putnam (Ed.), *Double-Edged Diplomacy. International Bargaining and Domestic Politics* (hlm. 128–167). University of California Press.
- Neuman, S. G. (1988). Aid and The Superpowers. *Foreign Affairs*, 66(5), 1044–1066.
- Neuman, S. G. (2010). Power, influence, and hierarchy: Defense industries in a unipolar world. *Defence and Peace Economics*, 21(1), 105–134.
<https://doi.org/10.1080/10242690903105398>
- Ningsih, N. S. (2019). Hambatan yang Dihadapi ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC) dalam Menentukan Platform Persenjataannya. *Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun XII*, XII(1), 115–134.
- Novitasari, C. N. (2021). Analisis Putusan Mahkamah Internasional dalam Kasus Sengketa Indonesia-Malaysia Mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(2), 231–262.
- Paul, T. V. (1992). Influence Through Arms Transfers: Lessons from the U.S.-Pakistani Relationship. *Asian Survey*, 32(12), 1078–1092.
- Perdana, I., & Melay, R. (2016). Indonesia-Malaysia Confrontation In 1963-1966 (The Economic Impacts on Society in Tanjung Balai Karimun).
- Raghavan, S., & Ben-Ari, G. (2011). Defense-Industrial Initiatives Group Current Issues: ASEAN Defense Industry Collaboration.
- Ringsmose, J. (2012). Investing in fighters and alliances: Norway, Denmark, and the bumpy road to the joint strike fighter. 68(1), 93–110.
- Ritchie, B. K. (2005). Coalitional politics, economic reform, and technological upgrading in Malaysia. *World Development*, 33(5), 745–761.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.01.006>
- Rosh, R. M. (1990). Third World Arms Production and the Evolving Interstate System. *Journal of Conflict Resolution*, 34(1), 57–73.
- Ruland, J. (2020). Asean as an Actor in the United Nations: How Cohesive Is It? Dalam K. E. Smith & K. V. Laatikainen (Ed.), *Group Politics in UN Multilateralism* (hlm. 115–134). Brill Nijhoff.
- Saidin, M. Y. M. (2020). MOHD IRWAN SYAZLI Saidin MOHAMMAD AGUS Yusoff Universiti Kebangsaan Malaysia SEPARATISME DAN TERORISME DI ASIA TENGGARA: KAJIAN KES GAM, MILF DAN PULO SEPARATISM AND TERRORISM IN SOUTHEAST ASIA: THE CASE OF GAM, MILF AND PULO.
- SIPRI. (2012). EU arms embargo on Indonesia. SIPRI Database: Arms Embargoes.
https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/indonesia
- SIPRI. (2022). SIPRI Arms Transfer Database. SIPRI.
<https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/toplist.php>

- SIPRI. (2023a). SIPRI Arms Industry Database. SIPRI Arms Industry Database. <https://www.sipri.org/databases/armsindustry>
- SIPRI. (2023b). SIPRI Arms Transfer Database: Trade Register. SIPRI Arms Transfer Database. https://armstrade.sipri.org/armstrade/page/trade_register.php
- Smith, S. (2004). Singing our world into existence: International relations theory and September 11. *International Studies Quarterly*, 48(3), 499–515. <https://doi.org/10.1111/j.0020-8833.2004.t01-1-00312.x>
- Soraya, N. A., Sirait, J. E., & Nulhakim, F. (2023). ASEAN Defense Industry Collaboration (ADIC): An Assessment of Potential Strategic Benefits for Indonesia Defense Industry. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(2), 90–95. <https://doi.org/10.47814/ijssrr.v6i2.884>
- ST Engineering. (2023). PRIMUS 155mm 39 Calibre Self Propelled Howitzer. Defence Products and Solutions. <https://www.stengg.com/primus-155-39-calibre-self-propelled-howitzer>
- Suprijanto, S. (2020). Existence of Capitalist Economic System in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 10(1).
- Tan, S. S. (2020). Is ASEAN Finally Getting Multilateralism Right? From ARF to ADMM+. *Asian Studies Review*, 44(1), 28–43. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1691502>
- Triantama, F. (2020). Kerjasama Pengembangan Medium Battle Tank Harimau Sebagai Perwujudan Ketahanan Alutsista Tentara Nasional Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 273–292.
- Triantama, F. (2023). Quo Vadis Industri Pertahanan Nasional: Urgensi Liberalisasi dan Rekalibrasi Visi Pembangunan Industri Pertahanan. Dalam F. Triantama (Ed.), *Refleksi Politik Internasional Kontemporer Gatot Subroto Kav.* 97 (hlm. 1–24). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. www.penerbitlitnus.co.id
- Tucker, J. B. (1991). *Partners and Rivals : A Model of International Collaboration in Advanced Technology*. *International Organization*, 45(1), 83–120.
- Völgyi, K. (2019). *Successful Model of State Capitalism: Singapore*. Dalam M. Szanyi (Ed.), *Seeking the Best Master: State Ownership in the Varieties of Capitalism* (hlm. 275–295). Central European University Press.
- Wahyudi, A. H. (2020). Analisis Implementasi Asean Defense Industry Collaboration (ADIC) dan Ketergantungan Impor Senjata Negara Anggota: Tinjauan Per Negara. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 17(2), 71–88.
- Waltz, K. (1979). *Theory of International Politics*. Addison-Wesley Publishing Company.
- Wei, D., & Chua, B. (2015). *Konfrontasi: Why It Still Matters to Singapore*. www.rsis.edu.sg